

**TINDAK TUTUR IMPERATIF DAN KESANTUNAN
BERBAHASA PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM BUKU *THE NEW SULSEL***

**THE IMPERATIVE SPEECH-ACT AND LANGUAGE
POLITENESS FOR GOVERNMENT OFFICERS OF SOUTH
SULAWESI IN THE NEW SULSEL BOOK**

TESIS

**YUSRIADI
F032192003**



**PROGRAM MAGISTER BAHASA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**TINDAK TUTUR IMPERATIF DAN KESANTUNAN BERBAHASA
PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
BUKU *THE NEW SULSEL***

**THE IMPERATIVE SPEECH-ACT AND LANGUAGE POLITENESS FOR
GOVERNMENT OFFICERS OF SOUTH SULAWESI IN THE NEW
SULSEL BOOK**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Prgram Studi
Bahasa Indonesia**

Didudun dan diajukan oleh

**YUSRIADI
Nomor Induk Mahasiswa F032192003**

Kepada

**PROGRAM MAGISTER BAHASA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

TESIS**TINDAK TUTUR IMPERATIF DAN KESANTUNAN
BERBAHASA PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM BUKU *THE NEW SULSEL***

Disusun dan diajukan oleh:

YUSRIADI**F032192003**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 02 Agustus 2021


Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Lukman, M.S.
Dr. Asriani Abbas, M.Hum.

Ketua Program Studi Bahasa Indonesia

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Dr. Asriani Abbas, M. Hum.
Prof. Dr. Akin Duli, M. A.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Yusriadi

NIM : F032192003

Program Studi : Bahasa Indonesia

Jenjang : Magister (S-2)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul **"Tindak Tuter Imperatif dan Kesantunan Berbahasa Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Buku *The New Sulsel*"** merupakan hasil karya penulis, bukan plagiat atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan, bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain yang di plagiat, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,


Yusriadi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin. Puji dan syukur penulis panjatkan atas izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Imperatif dan Kesantunan Berbahasa Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Buku *The New Sulsel*” dapat diselesaikan dengan baik. Salam serta selawat tak lupa penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi panutan kita semua sebagai muslim yang taat beribadah.

Sejak awal penulis ingin menyelesaikan penelitian ini tepat waktu dan alhamdulillah dapat tercapai. Meski pada proses penelitian tidak sedikit hambatan dan masalah yang dihadapi, namun berkat kemauan yang kuat serta dorongan dari semua pihak akhirnya setiap hambatan dan masalah dapat dilalui dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian sekaligus studi pada jejang magister (S-2) ini. Terutama kepada kedua orang tua, ayahanda H Ismail dan ibunda Halimah. Berkat doa dan restu keduanya, penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada istri tercinta K.M. Mutmainnah, S.Pd.I dan anakda tersayang, Haidah Zahratussalmah. Terima kasih atas dukungan semangat dan pengertiannya selama ini karena sering mengurangi jatah

kebersamaan sebab harus berhadapan dengan laptop hingga larut malam. Kini jatah bermain bersama bisa lebih banyak.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Lukman, M.S. sebagai pembimbing pertama yang telah sabar meluangkan waktu demi memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis hingga penelitian ini selesai.
2. Ibu Dr. Asriani Abbas, M. Hum. sebagai pembimbing kedua yang tidak pernah lelah ditemui dan ditelepon saat meminta pembimbingan penelitian ini. Ibu juga memberikan banyak motivasi, sehingga penulis terus bersemangat untuk merampungkan penelitian ini hingga penyelesaian studi.
3. Tim penguji : Bapak Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., Ibu Prof. Dr. Gusnawaty, M.Hum., Ibu Dr. Ery Iswary, M.Hum. yang telah banyak memberikan kritik dan saran membangun sehingga penulis dapat melengkapi referensi dan kekurangan lain dalam proses penelitian hingga selesai.
4. Teman-teman satu angkatan Magister (S-2) Bahasa Indonesia, Ilham Wasi, Bulan Rara Yansen, Risa Anjelita, dan Dewinda terima kasih sudah menjadi teman berbagi motivasi dan semangat. Semoga kita semua ditunjukkan jalan sukses.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan maksimal demi penyelesaian studi.

6. PT Media Fajar Koran karena telah menghasilkan Buku *The New Sulsel* yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf kepada direksi FAJAR, tempat penulis bekerja. Penulis telah melanjutkan pendidikan secara diam-diam, namun penulis pastikan tidak ada pekerjaan yang terbengkalai selama proses perkuliahan. Semua bisa penulis jalankan berbarengan.

Terakhir, semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi yang membacanya. Terutama bisa menjadi rujukan bagi peneliti ilmu kebahasaan khususnya terkait tindak tutur imperatif dan kesantunan berbahasa pejabat. Wassalam.

ABSTRAK

YUSRIADI. *Tindak Tutur Imperatif dan Kesantunan Berbahasa Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Buku The New Sulsel* (dibimbing oleh Lukman dan Asriani Abbas).

Penelitian ini bertujuan (1) mengklasifikasi wujud tuturan imperatif pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan (2) menjelaskan strategi kesantunan tuturan imperatif pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam buku *The New Sulsel*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta-fakta secara empirik hadir pada penutur-penuturnya. Sumber data adalah tuturan para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam buku *The New Sulsel*. Metode yang digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. Data disajikan dengan menggunakan teori tindak tutur dan kesantunan dengan mengikuti langkah-langkah (1) pengelompokan data hasil menyimak dan mencatat buku *The New Sulsel*; (2) mengklasifikasi wujud tuturan imperatif dan menjelaskan strategi kesantunan tuturan imperatif pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan (3) menyimpulkan tindak tutur imperatif dan kesantunan berbahasa pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam buku *The New Sulsel*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) wujud tindak tutur imperatif pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu secara deklaratif, interogatif, dan optatif. Dari segi wujud ini, kecenderungan tuturan imperatif pejabat lebih dominan secara deklaratif dan optative, yang berarti unsur imperatifnya disampaikan tersirat. Hal ini tidak terlepas dari prinsip budaya lokal 3-S (*sipakatu, sipakalebbi, dan sipakainge*) yang bermakna saling memaanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan. (2) Strategi kesantunan tuturan imperatif pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencakup kesantunan langsung, kesantunan tidak langsung, kesantunan positif, dan kesantunan negatif. Terkait strategi ini, tuturan pejabat lebih cenderung pada kesantunan positif yang berarti kesantunan para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat santun dalam menyampaikan tuturan imperatif. Kondisi demikian dapat berdampak kepada tidak maksimalnya pesan perintah yang disampaikan sehingga mitra atau lawan tutur tidak maksimal pula dalam mengerjakan perintah tersebut.

Kata kunci: tuturan imperatif, kesantunan berbahasa, pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



ABSTRACT

YUSRIADI. *Imperative Speech Acts and Language Politeness used by the government officials of South Sulawesi Province in the book The New Sulsel* (supervised by Lukman and Asriani Abbas)

The study aims to (1) classify the forms of imperative speech acts, and (2) explain the language politeness strategy of imperative speech acts used by the government officials of South Sulawesi Province in the book *The New Sulsel*.

The type of research used in this study is descriptive qualitative which describes the facts that are empirically present in the speakers. The source of the data is the utterances of the government officials of South Sulawesi Province that showed in the book *The New Sulsel*. The research used a listening and note-taking method. The data is presented using speech act and politeness theory with a descriptive method by following the steps: (1) grouping the data from the listening and note-taking result in the book *The New Sulsel*; (2) classifying imperative speech acts forms and explaining language politeness strategies used by the government officials of South Sulawesi Province; (3) conclude imperative speech acts and language politeness used by the government officials of South Sulawesi Province as shown in the book *The New Sulsel*.

The results showed that the forms of imperative speech acts used by the government officials of South Sulawesi Province were declarative, interrogative, and optative. In terms of this form, the tendency of official imperative speech is more dominant declaratively and optatively, which means that the imperative element is implied. It cannot be separated from the principle of local culture 3S (*Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge*) which means to humanize each other, respect each other, and remind each other. Furthermore, the imperative speech acts forms and language politeness strategies used by the government officials of South Sulawesi Province are direct politeness, indirect politeness, positive politeness, and negative politeness. In this strategy, the speech of government officials is more likely to be a positive politeness strategy which means that officials in the South Sulawesi provincial government are very polite in conveying imperative speech or orders. This condition can have an impact on not being optimal in the message conveyed. Therefore, the partner or interlocutor is not optimal in fulfilling the order.

Keywords: imperative speech acts, language politeness, the government officials of South Sulawesi Province.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hasil Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teori	13
1. Pragmatik	13
2. Tindak Tutur.....	15
3. Tuturan Imperatif.....	22
4. Implikatur	25
5. Kesantunan Berbahasa.....	29
6. Buku <i>The New Sulsel</i>	42
C. Kerangka Pikir.....	43
D. Definisi Operasional	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Data dan Sumber Data	47
C. Metode Pengumpulan Data.....	47
D. Prosedur Penelian.....	47

F. Teknis Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	52
1. Wujud Tindak Tutur Imperatif Pejabat	52
1.1. Wujud Tuturan Deklaratif	52
1.2. Wujud Tuturan Interogatif	57
1.3. Wujud Tuturan Optatif.....	59
2. Strategi Kesantunan Tuturan Imperatif	65
2.1. <i>Tanpa Strategi</i>	65
2.2. <i>Strategi Kesantunan Positif</i>	68
2.3. <i>Strategi Kesantunan Negatif</i>	75
2.4. <i>Strategi Tidak Langsung</i>	78
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN I	93
LAMPIRAN II	104
LAMPIRAN III	105

DAFTAR SINGKATAN

1. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
2. Sulsel : Sulawesi Selatan
3. Dinkes : Dinas Kesehatan
4. GDP : Gowa Discovery Park
5. PUTR : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Pemprov : Pemerintah Provinsi
9. 3-S : *Sipakanga, Sipakatau, Sipakalebbi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Bahasa hadir sebagai wadah yang pada prinsipnya merupakan alat komunikasi yang menunjukkan identitas masyarakat pemakai bahasa. Bahasa pula yang menjembatangi ide, gagasan, dan pemikiran, untuk diungkapkan dengan maksud agar pesan yang diucapkan penutur tersampaikan dengan baik kepada mitra tutur.

Bahasa dapat menunjukkan pribadi seseorang termasuk identitas di mana bahasa itu hidup dan digunakan. Masyarakat Sulawesi Selatan terkenal dengan budaya sopan santun dan saling menghargai, tidak terkecuali saat bertutur dalam proses komunikasi. Dalam peristiwa tindak tutur, budaya tidak bisa dilepaskan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi hubungan antara penutur dan lawan tutur.

Nilai kesantunan tutur dalam interaksi kehidupan sehari-hari sangat penting untuk masyarakat. Hal ini menciptakan harmoni dalam interaksi dan mencerminkan orang-orang dan realitas kondisi sosial budaya masyarakat kontemporer (Gusnawaty, Yastiana, & Yassi, 2017). Masyarakat Sulawesi Selatan menjunjung nilai budaya lokal, yaitu 3S (*Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge*) dalam bertindak, berperilaku, dan bertutur. Citra (2019 : 3) menjelaskan, budaya *sipakatau*, yaitu sifat untuk memandang manusia seperti manusia.

Sipakalebbi, yaitu sifat yang melarang kita melihat manusia dengan segala kekurangannya. *Sipakainge*, yaitu sifat saling mengingatkan.

Masyarakat Bugis-Makassar memiliki suatu asas moralitas yang dijadikan sebagai pedoman dalam beraktivitas. Asas moralitas itu disebut *ade'* atau adat (Takko, A.B, 2020: 2). Rahim (1992: 125) menjelaskan bahwa yang disebut adat adalah bicara yang jujur, perilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, serta kebajikan yang meluas. Dengan kata lain, adat itu mengandung dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kecendekian, kepatutan, keteguhan dan usaha serta *sir'*.

Budaya 3-S ini terbawah dalam proses komunikasi sehingga orang Bugis-Makassar cukup santun dalam bertutur. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut "tata-krama" (Hasrianti, 2014: 2).

Anita (2017: 12) mengemukakan bahwa karakter, watak atau pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari tuturannya. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, sistematis, teratur, jelas, dan lugas mencerminkan penuturnya berbudi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar, tidak sopan, dan tidak santun menunjukkan pribadi yang tidak berbudi. Oleh karena itu, tuturan yang tertib dan santun menjadikan bahasa sebagai alat yang efektif dalam proses penyampaian ide dan perasaan.

Dalam berkomunikasi, muncul yang disebut masyarakat tutur. Masyarakat tutur ini timbul karena rapatnya komunikasi atau integrasi simbolis dengan tetap menghormati kemampuan komunikatif penuturnya tanpa mengingati jumlah bahasa atau jumlah variabel yang digunakan (Chaer, 2010: 38). Sebaliknya, penutur menggunakan strategi linguistik yang berbeda dalam memperkenalkan secara wajar lawan tuturnya dengan empat strategi (Wijana, 2009: 64). Keempat strategi tersebut adalah (1) kurang sopan, digunakan untuk berkomunikasi dengan akrab, (2) agak sopan, digunakan untuk berkomunikasi terhadap teman yang tidak begitu akrab, (3) sopan, digunakan untuk berkomunikasi terhadap orang yang belum dikenal, dan (4) paling sopan, digunakan untuk berkomunikasi terhadap orang yang berstatus sosial lebih tinggi posisinya (status, jabatan, dan kedudukan).

Peristiwa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak semata-mata bertujuan menyampaikan maksud melalui tuturan. Selain tujuan penyampaian maksud, komunikasi juga bertujuan untuk membina hubungan sosial antara penutur dan petutur. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu media membangun hubungan sosial antara penutur dan petutur. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Pranowo (2009: 4) yang mengemukakan bahwa dalam konteks hubungan sosial, bahasa memiliki fungsi sebagai penyampai rasa santun, penyampai rasa keakraban dan hormat, serta penyampai rasa solidaritas.

Penggunaan bahasa dan sikap berbahasa adalah unsur kesantunan yang berpengaruh dalam peristiwa komunikasi. Kesantunan berbahasa menentukan keharmonisan antara penutur dan petutur. Wujud kesantunan berbahasa akan terlihat dalam aktivitas bertanya jawab, memberitahu, menyuruh, melarang, menolak, meminta, dan tindak tutur lainnya.

Hal penting yang berkenaan dengan keberhasilan pengaturan interaksi sosial melalui bahasa adalah strategi-strategi yang mempertimbangkan status penutur dan sasaran tuturan. Keberhasilan penggunaan strategi-strategi ini menciptakan suasana kesantunan yang memungkinkan transaksi sosial berlangsung tanpa mempermalukan penutur dan mitra tutur (Ismari, 1995: 35).

Pejabat dalam sebuah pemerintahan tentu memiliki peran penting untuk mengomunikasikan program dan kebijakan yang telah dibuat atau ditetapkan. Tidak terkecuali pejabat pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membawahi 24 kabupaten/kota. Sangat dibutuhkan pola komunikasi yang baik sehingga pesan yang ingin disampaikan lewat tuturan dapat berterima, baik oleh masyarakat luas maupun mitra tuturnya.

Selama ini tidak sedikit proyek dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbengkalai. Tentu banyak faktor yang menjadi pemicunya. Salah satunya adalah akibat lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pejabat terkait. Ketegasan yang dimaksud antara lain melalui tuturan. Bahkan, akibat terlalu santun

membuat maksud yang ingin disampaikan lewat tuturan tersebut tidak dapat sampai kepada mitra tutur.

Dalam bersosialisasi, sangat penting penggunaan tuturan yang tepat. Terutama jika tuturan tersebut terkait perintah dan larangan atau yang mengandung unsur imperatif. Sekaitan aktivitas menyosialisasikan proyek dan kebijakan tertentu, ada persoalan yang hadir berkenaan dengan tindak tutur. Hal ini pada cara penyampaian tuturan, termasuk menyangkut kesantunan. Misalnya, seorang pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan:

- (1) . “*Kita tidak mau proyek ini gagal*”
- (2) . “*Apakah pekerjaan itu sudah dapat diresmikan?*”

Tuturan (1) disampaikan oleh salah seorang pejabat kepada kontraktor yang bertindak sebagai pelaksana suatu proyek yang tersendat pekerjaannya. Dari segi wujud, tuturan tersebut menggunakan tuturan deklaratif atau pernyataan. Meskipun niatnya ingin memerintah agar kontraktor lebih gesit melakukan pekerjaan, pejabat tersebut memilih tidak menyampaikannya secara terus terang. Sebenarnya, pejabat tersebut dapat menyampaikan secara tegas dengan mengatakan “*Selesaikan segera proyek ini!*”. Dari segi strategi kesantunan tuturan imperatif, pejabat tersebut menggunakan strategi kesantunan positif. Strategi ini ditujukan langsung kepada muka positif lawan tutur supaya keinginan penutur dianggap sebagai keinginan bersama antara penutur dengan lawan tutur.

Selanjutnya, pada tuturan (2), masih disampaikan seorang pejabat atas satu proyek yang tengah berlangsung pekerjaannya.

Wujud tuturannya menggunakan pola interogatif atau bertanya. Wujud tuturan berupa pertanyaan ini sebenarnya mengandung unsur imperatif yaitu perintah kepada kontraktor agar mempercepat pelaksanaan proyek sebab sudah mendesak untuk segera diresmikan. Kemudian, strategi tuturan imperatif yang digunakan juga memakai strategi kesantunan positif. Penutur atau pejabat berusaha tidak membuat nosi atau wajah positif dari lawan tuturnya menjadi terancam dengan cara bertanya. Sebenarnya dapat saja penutur lebih tegas dengan mengatakan "*Selesaikan cepat pekerjaan itu karena sudah mendesak diresmikan!*". Namun penutur tidak menggunakan perkataan tersebut dengan maksud ingin santun atau menjaga nosi atau muka dari mitra tuturnya.

Pejabat publik dalam sebuah pemerintah penting menggunakan pola berkomunikasi yang baik. Tanpa penggunaan komunikasi yang baik oleh pejabat publik, interaksi dengan masyarakat menjadi pasif dan kaku (Eka Putri, 2019: 18). Dapat dimaklumi bahwa pejabat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin selalu santun karena terkait dengan budaya Bugis-Makassar yang memang dikenal santun melalui prinsip *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*. Boleh saja seorang pejabat santun, tetapi strategi kesantunan itu tidak memberikan efek atau pengaruh besar sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar proyek dapat segera diselesaikan.

Pada penelitian ini, dipilih satu objek berupa buku yang berjudul *The New Sulsel* yang diterbitkan PT Media Fajar Koran tahun 2019. Buku tersebut berisi 79 naskah dengan tebal 121 halaman. Isinya menyangkut proyek, kebijakan, serta program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Buku ini hadir sebagai wadah menyampaikan informasi untuk mengomunikasikan semua proyek, program dan kebijakan, agar memperoleh dukungan semua pihak sehingga dapat berjalan maksimal tanpa kendala. Buku ini pun telah dibagikan kepada para bupati dan pejabat setingkat kepala dinas di 24 kabupaten/kota pada momen acara diskusi akhir tahun 2019 di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Artinya buku ini dibaca oleh masyarakat luas sehingga menarik untuk dijadikan data penelitian sekaitan dengan tindak tutur dan kesantunan berbahasa pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena tindak tutur dan kesantunan berbahasa para pejabat dalam Buku *The New Sulsel* akan diungkap pada rumusan masalah berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penjelasan pada latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah berikut ini.

1. Bagaimana wujud tindak tutur imperatif pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam buku *The New Sulsel*?
2. Bagaimana strategi kesantunan tuturan imperatif pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam buku *The New Sulsel*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut ini.

1. Mengklasifikasi wujud tindak tutur imperatif pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam buku *The New Sulsel*.
2. Menjelaskan strategi kesantunan tuturan imperatif pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam buku *The New Sulsel*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

- a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan teori-teori pragmatik serta menghadirkan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa, khususnya pada tuturan imperatif dan kesantunan berbahasa.
- b. Menambah khazanah atau kekayaan teori kebahasaan, terutama yang berkaitan dengan kajian pragmatik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut ini.

- a. Menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya bagi para pejabat agar setiap tuturannya lebih jelas dan terarah.

- b. Memberi sumbangsih untuk memperlancar komunikasi pejabat dengan bawahan dan masyarakat demi mendukung proyek, kebijakan dan program di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini.

1. Wahyu Setianingsih. 2016. (*Implikatur Percakapan di Balik Tuturan Pejabat Pemerintah pada Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMK*). Hasil penelitian ini menemukan bahwa bentuk implikatur percakapan di balik tuturan pejabat pemerintah pada surat kabar harian Jawa Pos Radar Solo mengandung dua jenis yaitu, implikatur percakapan konvensional yang menyatakan asertif sebanyak 2 data atau 8 persen, dan nonkonvensional yang menyatakan direktif sebanyak 9 data atau 34 persen, serta menyatakan komisif sebanyak 2 data atau 8 persen. Selanjutnya fungsi implikatur percakapan di balik tuturan pejabat pemerintah pada surat kabar harian Jawa Pos Radar Solo yang menyatakan berita sebanyak 2 data atau 8 persen, menyatakan perintah sebanyak 9 data atau 34 persen, dan menyatakan janji sebanyak 2 data atau 8 persen.
2. Anita Rahman. 2017. (*Kesantunan Berbahasa Indonesia Masyarakat dan Polisi pada Pemeriksaan Lalu Lintas Kepolisian Polres Gowa*). Hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa wujud kesantunan berbahasa Indonesia masyarakat dan polisi

direpresentasikan dalam bentuk pilihan kata yang terdiri atas; (1) penggunaan kata ganti, meliputi kata ganti kita; (2) penggunaan bentuk informal, meliputi *-ki, -ta, tabe*; (3) penggunaan kata sapaan, meliputi kata sapaan *pak* dan *bu*; (4) penggunaan respons mengiyakan, meliputi respon mengiyakan *iya*. Representasi kesantunan berbahasa melalui tuturan terdiri atas; (1) tuturan bermodus deklaratif, (2) tuturan bermodus imperatif, dan (3) tuturan bermodus interogatif.

3. Indah Rahayu. 2018. (*Implikatur Percakapan dalam Dialog Interaktif Mata Najwa Metro TV dengan Pejabat Publik Periode Januari-Juli 2017*). Penelitian ini menganalisis implikatur percakapan dalam dialog interaktif Mata Najwo Metro TV dengan pejabat publik periode Januari-Juli 2017. Ada dua yang menjadi fokusnya yakni wujud implikatur percakapan pejabat publik dan yang kedua maksud dari implikatur percakapan tersebut.
4. Sri Minda Murni. 2009. (*Kesantunan Linguistik dalam Ranah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara*). Pada hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa pertama, ada dua tindak tutur yaitu tindak tutur meminta penjelasan dan memberikan pendapat direalisasi melalui modus, pronomina, pemarkah kesantunan, kata berpagar (*hedges*), perujuk diri (*committers*), dan penurun (*downtoner*). Kedua, perilaku normatif di rapat DPRD Prov-SU direalisasikan melalui: 1) modus interogatif dan imperatif dalam tindak tutur meminta penjelasan dan modus deklaratif dalam tindak

tutur memberikan pendapat; 2) pronomina yang mempertahankan kelompok dalam (*in-group*) terpisah dari kelompok luar (*out-group*); 3) pemarkah kesantunan; dan 4) perujuk diri (*committers*). Ketiga, perilaku santun di rapat DPRD Prov-SU direalisasikan melalui: a) modus deklaratif dalam meminta penjelasan dan modus interogatif dan imperatif dalam memberikan pendapat; b) pronomina yang menggabungkan kelompok dalam (*in-group*) dengan kelompok luar (*out-group*); c) kata berpagar (*hedges*); dan d) penurun (*downtoner*).

Secara garis besar, empat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Dari sumber data, semua mengambil data pada sumber yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama dengan penelitian ini yang mengambil data dari Buku *The New Sulsel* yang diterbitkan PT Media Fajar Koran pada tahun 2009. Demikian juga dengan tujuan akhir penelitian. Jika pada empat penelitian lain tersebut dominan hanya ingin menggambarkan wujud atau bentuk ujaran kesantunan, penelitian ini lebih jauh melihat strategi kesantunan dari pejabat. Artinya ada pengembangan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tentu masih banyak lagi, hasil penelitian lainnya yang mungkin luput dari pengamatan penulis. Namun pada intinya, penelitian ini tetap berangkat dari penelitian sebelumnya, untuk memberikan sumbangsih lain demi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa penelitian terkait tindak tutur dan kesantunan

pejabat dalam buku *The New Sulsel* belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Pragmatik

Pragmatik merupakan suatu cabang dari linguistik yang objek menjadikan bahasa dalam penggunaannya sebagai objek kajian, seperti komunikasi lisan dan tertulis. Pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa berintegrasi dengan tata bahasa yang terdiri atas fonologi, morfologi, sintaksis. Di dalam bahasa, pragmatik juga memperhatikan suara, morfem, struktur kalimat, dan makna suatu kalimat atau ujaran (Leech, 1993: 3).

Dalam pendapat lain dijelaskan bahwa pragmatik sebagai studi bahasa mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya. Selain harus memahami pemakaian bahasa kita dituntut pula untuk memahami konteks yang mawadahi penggunaan bahasa tersebut. Pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat itu berada (Levinson dalam Iskandar, 2015: 9)

Dalam teori yang hampir sama juga dijelaskan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Pendengar berusaha menafsirkan tuturan penutur sehingga akan diperoleh

makna, maksud, tujuan dari penutur. Setelah pendengar mengetahui maksud penutur, akan diketahui jenis tindakan yang harus dilakukan oleh pendengar. Untuk itu yang menjadi pusat perhatian pragmatik adalah maksud penutur yang terdapat dibalik tuturan yang diutarakan (Yule, 2006: 3).

Yule (2006: 43) menyatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang tuturan, artinya studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur/penulis selanjutnya ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca. Yule menyebutkan beberapa batasan ilmu pragmatik. Menurut Yule ilmu pragmatik mempunyai empat batasan. Keempat batasan tersebut terdapat pada rincian berikut ini.

1. Pragmatik adalah studi yang mempelajari maksud penutur.
2. Pragmatik adalah studi yang mempelajari makna kontekstual.
3. Pragmatik adalah studi yang mempelajari bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan dari pada yang dituturkan.
4. Pragmatik adalah studi yang mempelajari ungkapan jarak hubungan maksud suatu tuturan di dalam peristiwa komunikasi. Oleh karena itu, analisis pragmatis berupaya menemukan maksud penutur, baik yang diekspresikan secara tersurat maupun yang diungkapkan secara tersirat di balik tuturan.

Definisi pragmatik juga dikemukakan ahli yang tidak jauh berbeda dengan definisi yang dijelaskan sebelumnya bahwa pragmatik adalah menelaah makna kaitannya dengan situasi ujaran.

Di dalam menelaah sebuah tuturan pendengar akan lebih mudah memahami maksud tuturan tersebut diucapkan (Tarigan, 2009: 105).

Maksud tuturan dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan komponen situasi tutur yang mencakupi penutur, mitra tutur, tujuan, konteks, tuturan sebagai hasil aktivitas dan tuturan sebagai tindakan verbal (Rustono, 1999: 82). Pragmatik juga selalu dikaitkan dengan pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi yang sesuai dengan dengan konteksnya atau sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi (Kridalaksana, 2008: 198).

Berdasarkan beberapa pengertian pragmatik tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Pragmatik menyelidiki makna yang terkait dengan konteks yang melingkupinya di luar bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara bahasa dan konteks merupakan dasar pemahaman pragmatik.

2. Tindak Tutur

Tindak tutur adalah teori penggunaan bahasa. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan Austin (dalam Saifuddin, 2019: 2) yang berfokus pada hubungan antara bahasa dan tindakan. Sebelum munculnya konsep tindak tutur, para ahli bahasa memperlakukan bahasa sebagai deskripsi tentang suatu keadaan atau fakta. Dengan konsep seperti ini berarti setiap pernyataan dalam bahasa terikat pada

apa yang disebut sebagai syarat atau kondisi kebenaran (*truth conditions*).

Kondisi kebenaran dijadikan satu-satunya alat ukur yang ditetapkan sebagai kriteria kebenaran kalimat dalam tuturan. Benar tidaknya makna tuturan bergantung pada benar tidaknya proposisi atau isi tuturan. Pernyataan bahwa "*Kamu sedih hari ini?*" bergantung pada kenyataan apakah wajahnya membuat orang prihatin dan merasa iba. Dengan kata lain sebuah kalimat harus dinilai berdasarkan pada fakta empiris.

Austin (dalam Saifuddin, 2019: 2) di sisi lain menolak anggapan bahwa pernyataan atau tuturan harus terikat pada nilai benar salah yang berdasarkan fakta empiris. Tidak semua pernyataan dapat diuji dengan kondisi kebenaran. Pernyataan "Jangan makan!" tentu tidak dapat diuji nilai kebenarannya karena pernyataan tersebut tidak menunjukkan deskripsi keadaan atau fakta. Pernyataan tersebut adalah larangan.

Saat menggunakan bahasa orang tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat yang terisolasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, dengan menggunakan bahasa penutur melakukan sesuatu atau membuat orang lain melakukan sesuatu. Inilah yang disebut sebagai tuturan performatif.

Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengategorisasi tuturan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif. Kategori yang pertama, yakni tuturan konstatif adalah

menyatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Jadi konstatif termasuk semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi dan sebagainya yaitu tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Sebagai contoh tuturan "*Pemainnya artis itu*" yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah pada isi tuturannya.

Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang tidak dapat diukur benar dan salahnya. Tuturan performatif ini lebih pada bagian dari melakukan sebuah tindakan, yang sekali lagi biasanya bukan dideskripsikan sebagai mengucapkan sesuatu. Tuturan itu membentuk atau menciptakan tindakan. Sebagai contoh tuturan "*Banjir mengancam permukiman!*" yang dituturkan dengan serius akan menghasilkan dampak sikap waspada pada mitra tuturnya. Bukan karena isi tuturannya benar atau salah, melainkan karena tuturan tersebut adalah peringatan atau tindak memperingatkan.

Sumbangan terbesar Austin dalam teori tindak tutur adalah pembedaan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Setiap kali penutur berujar, dia melakukan tiga tindakan secara bersamaan, yaitu (a) tindak lokusi (*locutionary acts*), tindak ilokusi (*illocutionary acts*) dan tindak perlokusi (*perlocutionary acts*). Menurut Austin (dalam Saifuddin, 2019: 9), andai si penutur berniat mengutarakan sesuatu yang pasti secara langsung, tanpa keharusan bagi si penutur untuk

melaksanakan isi tuturannya, niatannya disebut tindak tutur lokusi. Bila si penutur berniat mengutarakan sesuatu secara langsung, dengan menggunakan suatu daya yang khas, yang membuat penutur bertindak sesuai dengan apa yang diturkannya, niatannya disebut tindak tutur ilokusi.

Dalam pernyataan lain, tindak ilokusi adalah tindak dalam menyatakan sesuatu (*performatif*) yang berlawanan dengan tindak menyatakan sesuatu (*konstatif*). Sementara itu, jika si penutur berniat menimbulkan respons atau efek tertentu kepada mitra tuturnya, niatannya disebut tindak tutur perlokusi. Bila tindak lokusi dan ilokusi lebih menekankan pada peranan tindakan si penutur, tindak perlokusi justru lebih menekankan pada bagaimana respons si mitra tutur. Hal yang disebutkan terakhir ini, berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai pemengaruh pikiran dan perasaan manusia. Kendati demikian, ketiga tindak tutur tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren di dalam keseluruhan proses tindak pengungkapan bahasa sehingga seharusnya mencerminkan prinsip adanya satu kata dan tindakan atau perbuatan.

Austin (dalam Saifuddin, 2019: 15) membagi tindak ilokusi ke dalam lima subjenis sebagaimana uraian berikut ini.

1. Verdiktif (*verdictives*), tindak tutur yang ditandai oleh adanya keputusan yang bertalian dengan benar-salah, misalnya “Hamdan *dituduh* menjadi dalang unjuk rasa”.

2. Eksersitif (*exercitives*), tindak tutur yang merupakan akibat adanya kekuasaan, hak, atau pengaruh, misalnya “saya *meminta* Anda untuk datang ke kantor pagi-pagi,” ujar Zacky kepada sekretarisnya.
3. Komisif (*commissives*), tindak tutur yang ditandai oleh adanya perjanjian atau perbuatan yang menyebabkan si penutur melakukan sesuatu, misalnya “Universitas Nasional *menandatangani* kerja sama dengan University Malaya dalam penerbitan jurnal ilmiah,” ucap Lina di muka rapat pimpinan.
4. Behavitif (*behavitives*), tindak tutur yang mencerminkan kepedulian sosial atau rasa simpati, misalnya “Pemerintah Singapura *ikut prihatin* terhadap TKI Indonesia yang mengalami penyiksaan di Arab Saudi”.
5. Ekspositif (*expositives*), tindak tutur yang digunakan dalam menyederhanakan pengertian atau definisi, misalnya “*bail out*” itu *ibarat* seseorang yang utang-nya kepada seseorang dibayari oleh orang lain yang tidak dikenalnya.”

Tindak perlokusi (*perlocutionary act*), melakukan suatu tindakan dengan mengatakan sesuatu. Tindak perlokusi menghasilkan efek atau hasil, yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan kalimat itu. Tanggapan tersebut tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga berbentuk tindakan atau perbuatan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh

penuturnya. Contoh: "Saya *lapar*", yang dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau menawarkan makanan kepada penutur.

Sementara itu, Searle (dalam Saifuddin, 2019: 17) telah menetapkan beberapa aturan yang lebih rinci. Aturan-aturan ini sebagian besar berkaitan dengan psikologis dan keyakinan penutur atau mitra tutur dan masing-masing dari mereka harus memenuhi syarat untuk menciptakan tindakan yang tepat. Searle menggolongkan tindak tutur ilokusi itu ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu dapat dirangkum berikut ini:

1. Asertif (*assertives*), yakni bentuk tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, menyarankan, membual (*boasting*), mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*).
2. Direktif (*directives*), yakni bentuk tuturan yang dimaksudkan penuturannya untuk membuat pengaruh agar si mitra tutur melakukan tindakan, misalnya, memesan (*orderin*), memerintah (*commanding*), memohon (*requesting*), menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*).
3. Ekspresif (*expressives*), adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan, misalnya berterima kasih (*thanking*), memberi selamat (*congratulating*), meminta maaf (*pardoning*),

menyalahkan (*blaming*), memuji (*praising*), berbelasungkawa (*condoling*).

4. Komisif (*commissives*), yakni bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran, misalnya berjanji (*promising*), bersumpah (*vowing*), dan menawarkan sesuatu (*offering*)
5. Deklarasi (*declarations*), yaitu bentuk tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan, misalnya berpasrah (*resigning*), memecat (*dismissing*), menbaptis (*christening*), memberi nama (*naming*), mengangkat (*appointing*), mengucilkan (*excommunicating*), dan menghukum (*sentencing*).

Dalam teori tindak tutur, satu bentuk ujaran dapat mempunyai lebih dari satu fungsi. Kebalikan dari kenyataan tersebut adalah kenyataan di dalam komunikasi yang sebenarnya bahwa satu fungsi dapat dinyatakan, dilayani atau diutarakan dalam berbagai bentuk ujaran (Syarifuddin 2019: 19).

Dengan adanya berbagai macam cara untuk menyatakan permintaan tersebut dapat disimpulkan dua hal mendasar, yakni adanya (1) tuturan langsung dan (2) tuturan tidak langsung. Tingkat kelangsungan tuturan itu dapat diukur berdasarkan besar kecilnya jarak tempuh serta kejelasan pragmatiknya. Yang dimaksud dengan jarak tempuh adalah jarak antara titik ilokusi yang berada dalam diri penutur dengan titik tujuan ilokusi yang terdapat dalam diri mitra tutur. Semakin jauh jarak tempuhnya semakin tidak langsunglah tuturan itu. Demikian pula sebaliknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan pragmatik adalah kenyataan bahwa semakin tembus pandang sebuah tuturan akan semakin langsunglah tuturan tersebut. Jika dikaitkan dengan kesantunan, semakin jelas maksud sebuah tuturan akan semakin tidak santunlah tuturan itu, sebaliknya semakin tidak tembus pandang maksud tuturan akan menjadi semakin santunlah tuturan itu.

3. Tuturan Imperatif

Imperatif adalah bentuk tuturan atau verba untuk mengungkapkan perintah, keharusan, maupun larangan untuk melaksanakan suatu perbuatan (Kridalaksana, 2008: 91). Dalam praktik komunikasi interpersonal sesungguhnya, makna imperatif dalam bahasa Indonesia tidak hanya diungkapkan dengan konstruksinya. Makna pragmatik imperatif sebuah tuturan tidak selalu sejalan dengan wujud konstruksinya, tetapi ditentukan oleh konteks situasi tutur yang menyertai, melingkupi, dan melatarinya (Rahardi, 2005: 5). Artinya dapat dikatakan bahwa dalam melakukan penelitian imperatif bahasa Indonesia, harus melihat konteks situasi yang melatari munculnya sebuah tuturan agar dapat menjelaskan berbagai kemungkinan makna pragmatik imperatif bahasa Indonesia.

Imperatif dan tindak tutur saling berkaitan erat. Dalam hubungannya sebagai tindak lokusioner tuturan imperatif merupakan pernyataan makna dasar dari konstruksi imperatif. Sebagai tindak ilokusioner makna imperatif pada dasarnya merupakan maksud yang disampaikan penutur dalam menyampaikan tuturan imperatif.

Selanjutnya, sebagai tindak perlokusioner sosok imperatif yang berkaitan dengan dampak yang timbul sebagai akibat dari tindak tutur.

Kalimat perintah adalah kalimat yang dimarkahi oleh pemarkah-pemarkah tertentu yang ditujukan oleh penutur kepada mitra tutur, baik secara tertulis maupun secara lisan yang menuntut adanya tindakan dari mitra tutur sesuai dengan tuntutan pelaku predikat kalimat bersangkutan. Tindakan itu antara lain dapat berupa perintah atau larangan (Noviatri, 2011: 13). Berdasarkan bentuknya tuturan imperatif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu (1) struktural imperatif berupa kalimat imperatif, dan (2) berupa imperatif pragmatik (Rahardi, 2008: 94).

1. Struktural Imperatif Berupa Kalimat Imperatif

Bentuk struktural imperatif adalah realisasi maksud imperatif yang dikaitkan dengan ciri formal atau ciri strukturalnya. Bentuk struktural imperatif dapat dilihat melalui susunan dan bentuk tuturan itu sendiri yaitu melalui kontruksi kalimat imperatif.

Kalimat perintah/imperatif merupakan kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan penutur. Kalimat ini bertujuan agar si mitra tutur memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Kalimat imperatif dapat berupa suruhan yang kasar sampai dengan permohonan yang sangat halus. Kalimat imperatif juga dapat pula berupa suruhan

untuk melakukan sesuatu sampai larangan untuk melakukan sesuatu Keraf (dalam Rahardi, 2008: 27).

2. Bentuk Pragmatik Imperatif

Berbeda dengan bentuk struktural imperatif, bentuk pragmatik imperatif tidak selalu berupa konstruksi kalimat imperatif. Dengan perkataan lain, bentuk pragmatik imperatif dapat berupa tuturan dengan konstruksi tuturan nonimperatif yang bermacam-macam (bentuk konstruksi kalimat lain) yang di dalamnya terdapat makna imperatif. Bentuk pragmatik imperatif sendiri merupakan realisasi maksud imperatif yang dikaitkan dengan konteks situasi tutur yang melatarbelakanginya. Makna pragmatik imperatif tuturan yang demikian sangat ditentukan oleh konteksnya. Dalam hal ini tuturan imperatif pragmatik terdiri atas tiga bentuk kalimat yaitu (a) kalimat pernyataan, (b) kalimat pertanyaan, dan (c) kalimat harapan.

a. Tuturan Imperatif Berupa Kalimat Pernyataan

Kalimat pernyataan atau deklaratif adalah kalimat yang mengandung memberitahukan sesuatu kepada mitra tutur. Sesuatu yang diberitahukan, biasanya berupa pengungkapan suatu peristiwa atau suatu kejadian. Kalimat ini bertujuan hanya untuk meminta pendengar atau mitra tutur untuk menaruh perhatian saja, dan mitra tutur tidak perlu melakukan sesuatu.

b. Tuturan Imperatif Berupa Kalimat Pertanyaan

Kalimat pertanyaan atau interogatif pada umumnya merupakan kalimat yang mengandung maksud menanyakan sesuatu kepada mitra tutur. Kalimat ini bertujuan untuk mengetahui jawaban terhadap suatu hal atau suatu keadaan secara lisan. Dalam kalimat pernyataan yang diminta bukanlah hanya sekedar perhatian, melainkan juga jawaban.

c. Tuturan Imperatif Berupa Kalimat Harapan

Kalimat harapan adalah kalimat yang menyatakan harapan. Jenis pernyataan harapan dapat disusun tanpa bentuk pasti. Sebuah kalimat harapan dapat juga bertindak di semua bentuk yang berbeda.

4. Implikatur

Istilah implikatur diturunkan dari verba *to imply* yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Secara etimologis, *to imply* berarti membungkus atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, implikatur percakapan adalah sesuatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual.

Brown dan Yule (dalam Rustono, 1999: 83) menyatakan bahwa implikatur digunakan untuk memperhitungkan apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Sebagai contoh, jika seorang ibu menyatakan "*Nak, bajumu*

kotor sekali!” dalam keadaan si anak selesai bermain bola, tuturan tersebut sesungguhnya bukan hanya bermaksud memberitahukan bahwa baju anak kotor, melainkan mengimplikasikan sebuah perintah untuk anak agar mengganti bajunya yang kotor itu dengan baju yang bersih.

Dalam kaitannya dengan hal ini, implikatur percakapan digunakan untuk mempertimbangkan apa yang dapat disarankan atau yang dimaksudkan oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang tampak secara harfiah.

Penggunaan implikatur dalam peristiwa komunikasi didorong oleh kenyataan adanya dua tujuan komunikasi sekaligus yang ingin dicapai oleh penutur, yaitu tujuan pribadi, yakni untuk memperoleh sesuatu dari mitra tutur melalui tuturan meminta yang disampaikannya dan tujuan sosial, yakni berusaha menjaga hubungan baik antara penutur dengan mitra tuturnya sehingga komunikasi tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Asumsi dasar percakapan adalah memberi dan menangkap informasi. Informasi tersebut tentu memiliki makna yang lebih banyak dari kata-kata yang disampaikan. Makna tersebut merupakan makna tambahan yang disampaikan atau yang disebut implikatur. Istilah implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah (Brown dan Yule, 1996: 31).

Dalam suatu tindak percakapan, setiap bentuk tuturan (*utterance*) pada dasarnya mengimplikasikan sesuatu. Implikasi tersebut adalah proposisi yang biasanya tersembunyi di balik tuturan yang diucapkan, dan bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut. Pada gejala demikian tuturan berbeda dengan implikasi (Wijana, 1996:37). Sebuah tuturan dapat mengimplikasikan proposisi yang bukan merupakan bagian dari tuturan tersebut.

Proposisi yang diimplikasikan itu dapat disebut dengan implikatur percakapan (Grice dalam Rahardi, 2005:43). Secara etimologis, implikatur diturunkan dari *implicatum*. Secara nominal, istilah ini hampir sama dengan kata *implication*, yang artinya maksud, pengertian, keterlibatan (Echols dalam Mulyana, 2005:11). Dalam lingkup analisis wacana, implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Secara struktural, implikatur berfungsi sebagai jembatan/rantai yang menghubungkan antara “yang diucapkan” dengan “yang diimplikasikan”. Jadi, suatu dialog yang mengandung implikatur akan selalu melibatkan penafsiran yang tidak langsung. Dalam komunikasi verbal, implikatur biasanya sudah diketahui oleh pembicara. Oleh karena itu tidak perlu diungkapkan secara eksplisit. Dengan berbagai alasan, implikatur justru sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak terlalu mencolok (Mulyana, 2005: 11).

Mulyana (2005: 11) juga memberikan penjelasan bahwa dalam ruang lingkup wacana, implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau

menjadi bahan pembicaraan. Adapun, menurut Lubis (2011: 71) implikatur adalah arti atau aspek artipragmatik. Dengan demikian, hanya sebagian saja dari arti literal (harfiah) itu yang turut mendukung arti sebenarnya, selebihnya berasal dari fakta-fakta di sekeliling kita (atau dunia ini) situasinya, kondisinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur adalah makna yang tersirat dalam sebuah tuturan yang dapat mengimplikasikan banyak makna. Di dalam implikatur hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud yang tidak dituturkan itu bersifat tidak mutlak. Inferensi maksud tuturan itu harus didasarkan pada konteks situasi tutur yang mewadahi munculnya tuturan tersebut (Rahardi, 2005: 42). Wijana (1996: 37) menyatakan bahwa sebuah tuturan dapat menimbulkan banyak implikatur bergantung oleh implikasi yang ditimbulkan dari tuturan tersebut.

Implikatur sebuah tuturan tergantung dari implikasi-implikasi yang hadir dari tuturan yang diperkuat dengan konteks yang meliputi tuturan tersebut. Wijana (1996: 38) memberikan contoh sebagai berikut ini.

- (1) *A: Bambang datang*
 B: Rokoknya disembunyikan
- (2) *A: Bambang datang*
 B: Aku akan pergi dulu

(3) A: *Bambang datang*

B: *Kamarnya dibersihkan*

Pada contoh (1) implikasi yang mungkin muncul adalah Bambang seorang perokok tapi dia tidak pernah membeli rokok. Hal ini menyebabkan munculnya tuturan “Jangan sampai Bambang tahu bahwa mereka membeli rokok karena Bambang pasti akan memintanya”. Tuturan yang muncul sebagai tanggapan “Bambang datang” pada contoh (2) mengimplikasikan bahwa orang itu tidak suka dengan kedatangan Bambang. Implikatur dari tuturan tanggapan tersebut adalah bahwa “orang itu tidak mau bertemu Bambang”.

Tuturan “kamarnya dibersihkan” pada contoh (3) mengimplikasikan bahwa Bambang adalah seorang yang pembersih dan akan marah jika melihat sesuatu yang kotor. Tuturan ini memiliki implikatur bahwa “orang itu tidak mau mendengarkan Bambang berkomentar atau marah-marah”.

5. Kesantunan Berbahasa

Kesantunan atau kesopanan adalah *“property associated with neither exceeded any right nor failed to fulfill any obligation”*. Dengan kata lain, kesopanan adalah properti yang diasosiasikan dengan ujaran dan di dalam hal ini menurut pendapat si pendengar, si penutur tidak melampaui hak-haknya atau tidak mengingkari memenuhi kewajibannya (Pateda, 1994: 5). Kesantunan mengacu pada menunjukkan karakter atau pertimbangan yang baik bagi orang lain. Aspek hirarki sosial dan status sosial menentukan kesantunan.

Kesantunan merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan kesopanan, rasa hormat, sikap yang baik atau perilaku yang pantas (Kushartanti, 2009: 257). Keterkaitan kesantunan dengan perilaku yang pantas mengisyaratkan bahwa kesantunan tidak hanya berkaitan dengan bahasa melainkan juga perilaku nonverbal (Eelen dalam Qadri, 2019: 8). Kesantunan menghubungkan bahasa dengan berbagai aspek dalam struktur sosial sebagaimana halnya dengan aturan perilaku dan etika.

Interaksi yang terjadi dalam setiap proses komunikasi akan melibatkan penutur dan lawan tutur. Tuturan yang disampaikan dapat berupa informasi, teguran, pertanyaan, perintah, penolakan, dan sebagainya. Tuturan yang disampaikan oleh penutur diusahakan saling berhubungan atau berkaitan (Purwo, 2004: 22). Salah satu aspek kompetensi komunikatif adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti dan menggunakan tuturan dalam bahasa yang santun. Norma-norma kesantunan bervariasi antara satu budaya dengan budaya lain atau satu daerah dengan daerah lain, maka penggunaan bahasa dari daerah yang berbeda dapat memiliki ide yang berbeda berkaitan dengan hal yang dianggap santun atau tidak santun. Cara berbicara santun menurut satu daerah atau budaya dapat dianggap tidak santun dan tidak layak menurut budaya lain.

Aspek yang perlu diperhatikan adalah kesantunan terletak pada persimpangan antara bahasa dan realitas sosial. Kesantunan berkaitan dengan bahasa dan aspek-aspek kehidupan struktur sosial

sekaligus kode-kode perilaku dan etika. Sebuah masyarakat dapat terbentuk dan dapat dipertahankan melalui suatu interaksi. Interaksi tersebut dapat dipahami dengan kajian kesantunan yang memiliki nilai-nilai etika dengan bahasa dan perilaku secara umum. Bentuk penggunaan bahasa selalu dikaitkan dengan hubungan sosial dan peran sosial. Melalui hubungan sosial, kesantunan dapat dihubungkan dengan kenyataan sosial masyarakat dan kebudayaan.

Pemakaian bahasa secara santun perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut sering terjadi dalam pemakaian bahasa yang baik ragam bahasanya dan benar tata bahasanya, namun nilai rasa di dalamnya menyakitkan hati lawan tuturnya. Hal ini terjadi karena penggunaan bahasa belum mengetahui bahwa dalam struktur bahasa terdapat struktur kesantunan. Menurut Pranowo (2012: 4), struktur bahasa yang santun adalah struktur bahasa yang disusun oleh penutur agar tidak menyinggung perasaan pendengar.

Penggunaan bahasa yang santun terkait dengan dua hal, yaitu pilihan kata dan gaya bahasa. Kemampuan seseorang memilih kata dapat menjadi salah satu penentu santun tidaknya bahasa yang digunakan. Pilihan kata yang dimaksud adalah ketepatan pemakaian kata untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu pada lawan tutur. Setiap kata memiliki makna tertentu dan memiliki kekuatan tertentu. Jika pilihan kata yang digunakan menimbulkan kekuatan bahasa yang menjadikan lawan tutur tidak berkenan, penutur akan disebut sebagai orang yang tidak

santun. Sebaliknya, jika lawan tutur berkenan dengan bahasa yang digunakan oleh penutur, maka akan disebut sebagai orang yang santun.

Berbahasa santun dilakukan seseorang karena terdorong oleh sikap hormat kepada lawan tutur. Seseorang yang berbahasa santun dimaksudkan sebagai wujud aktualisasi diri. Jika ternyata aktualisasi diri dengan bahasa santun dapat berkenan bagi lawan tutur, sebenarnya hanyalah efek bukan tujuan. Setiap orang harus menjaga kehormatan dan martabat diri sendiri. Hal inilah yang dimaksudkan agar orang lain juga dapat menghargainya. Inilah hakikat berbahasa secara santun. Kesantunan berbahasa merupakan cara yang dilakukan oleh penutur dalam berkomunikasi agar lawan tutur tidak merasa adanya tekanan atau tersinggung (Markhamah, 2011: 153).

Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekadar menyampaikan ide yang kita pikirkan (Anita, 2017: 17). Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya. Tata cara berbahasa sangat penting diperhatikan para peserta komunikasi

(komunikator dan komunikan) demi kelancaran komunikasi. Dengan mengetahui tata cara berbahasa diharapkan orang lebih dapat memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi karena tata cara berbahasa bertujuan mengatur serangkaian hal berikut ini.

1. Apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu.
2. Ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu.
3. Kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan sela diterapkan.
4. Bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara.
5. Bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara.
6. Kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan.

Kesantunan (*politeness*), kesopansantunan atau etiket adalah tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Oleh karena itu, kesantunan ini biasa disebut “tatakrama” (Misklikah, 2019: 61).

Berdasarkan pengertian tersebut, Misklikah (2019: 61) mengemukakan kesantunan dapat dilihat dari berbagai segi dalam pergaulan sehari-hari. Pertama, kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etiket dalam

pergaulan sehari-hari. Ketika orang dikatakan santun, maka dalam diri seseorang itu tergambar nilai sopan santun atau nilai etiket yang berlaku secara baik di masyarakat tempat seseorang itu mengambil bagian sebagai anggotanya. Ketika dia dikatakan santun, masyarakat memberikan nilai kepadanya, baik penilaian itu dilakukan secara seketika (mendadak) maupun secara konvensional (panjang, memakan waktu lama). Sudah barang tentu, penilaian dalam proses yang panjang ini lebih mengekalkan nilai yang diberikan kepadanya.

Kedua, kesantunan sangat kontekstual, yakni berlaku dalam masyarakat, tempat, atau situasi tertentu, tetapi belum tentu berlaku bagi masyarakat, tempat, atau situasi lain. Ketika seseorang bertemu dengan teman karib, boleh saja dia menggunakan kata yang agak kasar dengan suara keras, tetapi hal itu tidak santun apabila ditujukan kepada tamu atau seseorang yang baru dikenal. Mengecap atau mengunyah makanan dengan mulut berbunyi kurang sopan kalau sedang makan dengan orang banyak di sebuah perjamuan, tetapi hal itu tidak begitu dikatakan kurang sopan apabila dilakukan di rumah. Ketiga, kesantunan selalu bipolar, yaitu memiliki hubungan dua kutub, seperti antara anak dan orangtua, antara orang yang masih muda dan orang yang lebih tua, antara tuan rumah dan tamu, antara pria dan wanita, antara murid dan guru, dan sebagainya. Keempat, kesantunan tercermin dalam cara berpakaian (berbusana), cara berbuat (bertindak), dan cara bertutur (berbahasa).

Menurut Leech (1993: 33), prinsip kerja sama sebagaimana yang dikemukakan dalam komunikasi yang sesungguhnya sering dilanggar atau tidak dipatuhi oleh para peserta tutur. Hal ini disebabkan karena di dalam komunikasi tujuan kita tidak hanya menyampaikan informasi saja, melainkan juga untuk menjaga atau memelihara hubungan-hubungan sosial antara penutur dan petutur (walaupun ada peristiwa-peristiwa tutur tertentu yang tidak menuntut pemeliharaan hubungan itu). Kebutuhan noninformatif ini termasuk dalam kebutuhan komunikatif yang bersifat semesta. Jika tujuan kita berkomunikasi hanya untuk menyampaikan informasi saja, maka strategi yang paling baik diambil adalah menjamin kejelasan pragmatik (*pragmatic clarity*) dan menjamin ketibaan daya ilokusi (*illocutionary force*) di titik ilokusi (di benak pendengar). Akan tetapi pada komunikasi sehari-hari, ujaran-ujaran seperti itu dianggap terlalu berterus terang dan oleh sebagian masyarakat dinilai tidak santun.

Untuk menentukan parameter kesantunan imperatif yang disebut oleh Leech (1993: 34) bahwa ada tiga skala kesantunan yang dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Skala kerugian atau *cost-benefit scale* dan keuntungan menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan.

2. Skala pilihan atau *optionally scale* menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan (*options*) yang disampaikan penutur kepada mitra tutur di dalam kegiatan bertutur.
3. Skala ketidaklangsungan atau *indirectness scale* menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan.

Pertama, *cost-benefit scale* atau skala kerugian dan keuntungan, menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan. Semakin tuturan tersebut merugikan diri penutur, akan semakin dianggap santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tuturan itu menguntungkan diri penutur akan semakin dianggap tidak santunlah tuturan itu.

Kedua, *optionality scale* atau skala pilihan, menunjuk pada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur. Semakin pertuturan itu memungkinkan penutur atau mitra tutur menentukan pilihan yang banyak dan leluasa, akan dianggap makin santunlah tuturan itu. Sebaliknya, apabila pertuturan itu sama sekali tidak memberikan kemungkinan memilih bagi si penutur dan si mitra tutur, tuturan tersebut akan dianggap tidak santun.

Ketiga, *indirectness scale* atau skala ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan. Semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap

semakin tidak santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin tidak langsung maksud sebuah tuturan, akan dianggap semakin santunlah tuturan itu.

Keempat, *authority scale* atau skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam pertuturan. Semakin jauh jarak otoritas (*authority scale*) antara penutur dan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin santun dan sebaliknya, semakin dekat jarak otoritas antara penutur dan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung menjadi semakin tidak santun.

Kelima, *social distance scale* atau skala jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan menjadi semakin kurang santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang digunakan itu. Dengan perkataan lain, tingkat keakraban hubungan antara penutur dengan mitra tutur sangat menentukan peringkat kesantunan tuturan yang digunakan dalam bertutur.

Adapun teori Brown dan Levinson berfokus pada konsep muka. Brown dan Levinson (1987: 60) mengidentifikasi empat strategi kesantunan atau pola perilaku umum yang dapat diaplikasikan penutur yaitu (1) *bald-on record strategy* (tanpa strategi), (2) *positive*

politeness strategy (strategi kesantunan positif/keakraban), (3) *negative politeness strategy* (strategi kesantunan negatif/formal), (4) *off-record politeness strategy* (strategi tidak langsung atau tersamar). Penjelasan mengenai masing-masing strategi kesantunan tersebut akan dipaparkan pada bagian berikut ini.

1. *Bald-on Record Strategy* (Tanpa Strategi)

Strategi ini sesuai dengan prinsip efisiensi dalam komunikasi (Brown dan Levinson 1987:94). Dengan strategi ini penutur tidak melakukan usaha apapun untuk meminimalisir ancaman bagi muka lawan tutur atau untuk mengurangi akibat dari tindakan yang mengancam muka (FTA). Strategi seperti ini akan mengakibatkan lawan tutur merasa terkejut, malu, dan tidak nyaman. Strategi ini banyak digunakan oleh penutur dan lawan tutur yang telah saling mengenal dengan baik, misalnya antar teman atau antar anggota keluarga. Strategi ini diwujudkan dalam kalimat imperatif langsung. Biasanya strategi ini juga untuk mengekspresikan dalam keadaan darurat.

2. *Positive Politeness Strategy* (Strategi Kesantunan Positif)

Strategi ini digunakan untuk menunjukkan keakraban kepada lawan tutur yang bukan orang dekat penutur. Untuk memudahkan interaksinya, penutur mencoba memberi kesan senasib dan seolah-olah mempunyai keinginan yang sama dengan lawan tutur dan dianggap sebagai keinginan bersama yang memang benar-benar diinginkan bersama pula. Strategi ini ditujukan langsung kepada

muka positif lawan tutur supaya keinginan penutur dianggap sebagai keinginan bersama antara penutur dengan lawan tutur.

Strategi ini juga berfungsi sebagai pelancar hubungan sosial dengan orang lain. Dengan menggunakannya, penutur menunjukkan bahwa dia ingin lebih akrab dengan lawan tutur. Dengan kata lain, hubungan menjadi lebih akrab dan mencerminkan kekompakan dalam kelompok. Strategi ini berusaha meminimalisasi jarak antara penutur dan lawan tutur dengan cara mengungkapkan perhatian dan persahabatan. Dengan demikian penutur meminimalisasi terancamnya "muka" lawan tutur. Strategi kesantunan positif direalisasikan dengan lima belas cara atau tindakan seperti berikut :

- (1) Memusatkan perhatian pada diri lawan tutur,
- (2) Memberi perhatian lebih, memberikan pengakuan atau simpati kepada lawan tutur,
- (3) mengintensifkan perhatian kepada lawan tutur,
- (4) menggunakan penanda keakraban kelompok,
- (5) menemukan kesepakatan,
- (6) menghindarkan konflik,
- (7) menyamakan anggapan menjadi pendapat umum,
- (8) berkelakar,
- (9) menambahkan atau menyetujui pendapat lawan tutur,
- (10) menawarkan bantuan atau janji,
- (11) bersikap optimis,

- (12) melibatkan penutur dan lawan tutur dalam kegiatan,
- (13) memberikan atau menanyakan alasan tertentu,
- (14) mengasumsikan atau menampilkan kesamaan tindakan,
- (15) memberikan hadiah.

3. *Negative Politeness Strategy* (Strategi Kesantunan Negatif)

Strategi kesantunan negatif adalah tindakan yang dilakukan untuk menebus muka negatif lawan tutur dan keinginan penutur untuk terbebas dari beban dengan maksud agar tindakan dan maksudnya tidak terganggu dan tidak terkendala. Tindakan ini tidak lain adalah dasar dari perilaku menghargai, yang terdapat pula pada strategi kesantunan positif. Bedanya strategi ini lebih spesifik dan lebih terfokus karena penutur menampilkan fungsi-fungsi penunjang untuk meminimalisir beban tertentu sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh lawan tutur. Fokus utama pemakaian strategi ini adalah dengan mengasumsikan bahwa penutur kemungkinan besar memberikan beban atau gangguan kepada lawan tutur karena telah memasuki daerah lawan tutur. Hal ini diasumsikan bahwa ada jarak sosial tertentu atau hambatan tertentu dalam situasi tersebut.

Strategi kesantunan ini direalisasikan dengan sepuluh cara atau tindakan seperti berikut:

- (1) menyatakan secara tidak langsung,
- (2) mengajukan pertanyaan atau mengelak,
- (3) bersikap pesimis,
- (4) mengecilkan beban permintaan,
- (5) merendahkan diri,
- (6) meminta maaf,
- (7) personalisasi penutur dan lawan tutur,
- (8) menempatkan tindakan mengancam muka sebagai aturan yang berlaku umum,
- (9) nominalisasi,
- (10) menyatakan secara jelas bahwa tindakan lawan tutur sangat berharga bagi penutur.

4. *Off-Record Politeness Strategy* (Strategi Tidak Langsung)

Strategi ini direalisasikan dengan cara tersamar dan tidak menggambarkan maksud komunikatif yang jelas. Dengan strategi ini penutur membawa dirinya keluar dari tindakan dengan membiarkan lawan tutur menginterpretasikan sendiri suatu tindakan. Strategi ini digunakan jika penutur ingin melakukan tindakan mengancam “muka” namun tidak ingin bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

6. Buku *The New Sulsel*

Buku *The New Sulsel* diterbitkan oleh PT Media Fajar Kora pada 2019 dengan tebal 121 halaman. Buku tersebut berisi 79 naskah yang terbagi atas beberapa bidang program unggulan yang dijalankan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang-bidang tersebut yakni infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, ekonomi, industri kreatif, pelayanan, pemerintahan, kerja sama, lingkungan, serta penghargaan. Naskah yang termuat merupakan saduran dari berita yang pernah termuat pada rubrik *Sulsel Kita* di Harian FAJAR. Meskipun berasal dari berita, naskah tidak terlalu banyak berubah terutama pada kutipan langsung dari tuturan yang diucapkan oleh para pejabat di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Setiap naskah dalam buku didukung oleh konteks di mana tuturan tersebut diucapkan, begitupun waktu dan foto sebagai pelengkap. Hal ini sangat mendukung untuk menganalisis konteks tuturan para pejabat, sehingga meskipun tuturan tersebut sudah dalam bentuk tulisan, tetap bisa diketahui konteksnya.

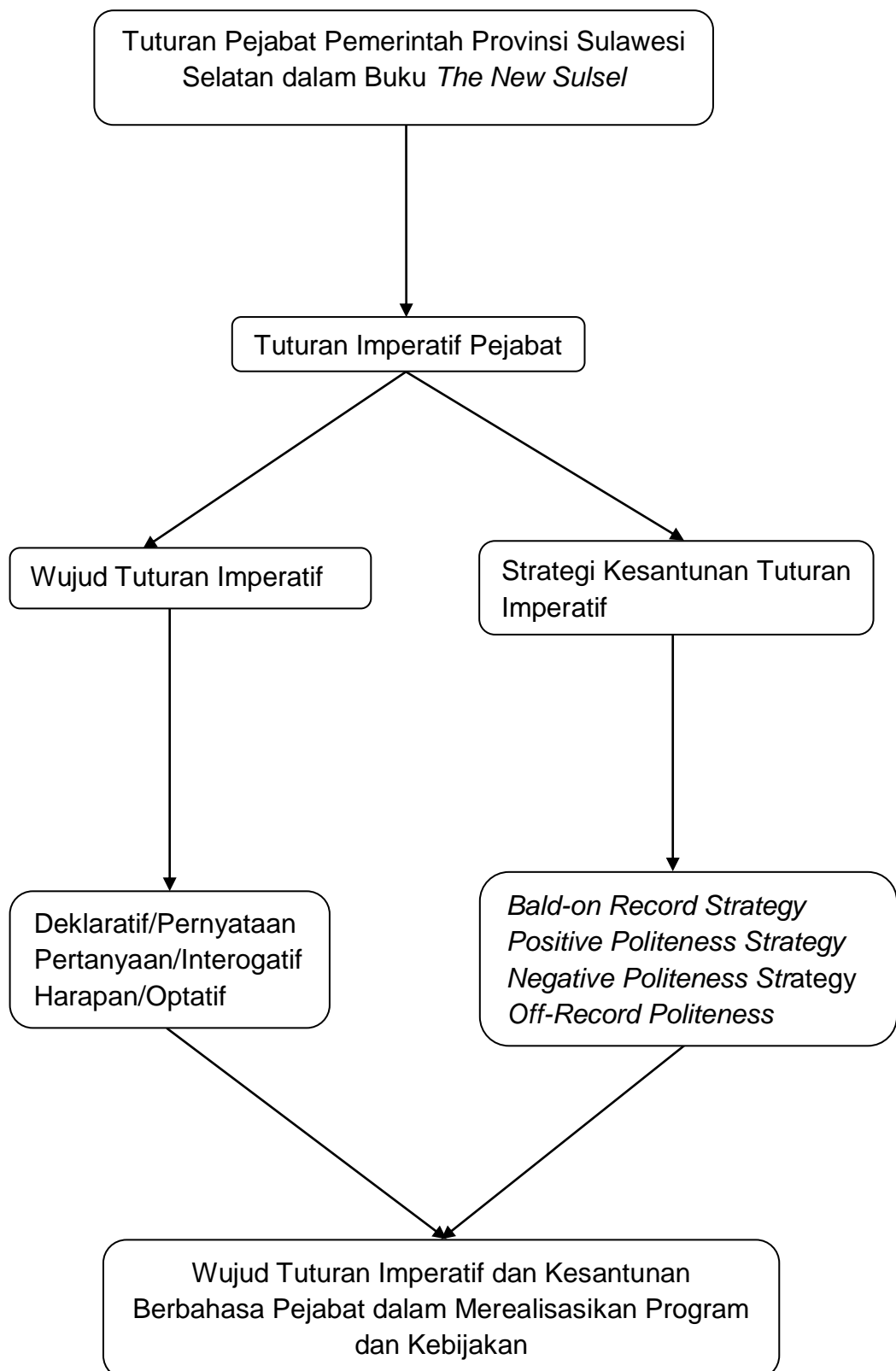
Buku *The New Sulsel* ini menjadi wadah komunikasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah daerah 24 kabupaten/kota dan masyarakat luas pada umumnya. Buku ini dibagi-bagi pada acara *Outlook Ekonomi Sulsel* pada akhir tahun 2019 lalu. Buku diberikan kepada para wali kota, bupati, dan pejabat se Sulawesi Selatan, sehingga buku ini diyakini dibaca oleh banyak kalangan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat pada data tuturan para pejabat dalam Buku *The New Sulsel*. Tuturan yang dimaksud adalah tuturan yang mengandung unsur imperatif yang dituturkan para pejabat. Sesuai dengan sasaran akhir yang ingin dicapai, ada dua hal pokok yang akan ditelisik lebih dalam yakni tindak tutur dan kesantunan berbahasa. Dua hal tersebut kemudian diulas lebih jauh sesuai dengan rumusan masalah yakni dari segi wujud tuturan imperatif dan strategi kesantunan tuturan imperatif para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada wujud tuturan imperatif, data tuturan terbagi menjadi tiga yakni secara deklaratif atau pernyataan, interogatif atau pertanyaan, dan harapan atau optatif. Strategi sendiri kesantunan terbagi atas empat yakni *bald-on record strategy* (tanpa strategi), *positive politeness strategy* (strategi kesantunan positif/keakraban), *negative politeness strategy* (strategi kesantunan negatif/formal), dan *off-record politeness strategy* (strategi tidak langsung atau tersamar).

Untuk mengarahkan kajian pada fokus penelitian, data tuturan pejabat dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hingga akhirnya ditemukan hasil penelitian berupa tindak tutur imperatif dan kesantunan berbahasa pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Buku *The New Sulsel*. Penjelasan kerangka pikir ini secara sederhana dapat terlihat pada bagan berikut ini.



D. Definisi Operasional

Untuk membentuk perspektif atau pandangan yang sama, istilah-istilah operasional dalam penelitian ini didefinisikan seperti yang diuraikan berikut ini.

1. Pragmatik adalah wujud berbahasa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi oleh penutur dan petutur.
2. Kesantunan berbahasa adalah aktivitas berbahasa yang dipengaruhi oleh konteks, baik konteks budaya maupun konteks partisipan yang terikat oleh norma-norma dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa, meliputi bentuk bahasa yang digunakan, fungsi penggunaan bahasa tersebut, dan strategi yang dipilih penutur, dalam hal ini pejabat.
3. Tindak tutur adalah tindak ilokusi. Tindak tutur dalam penelitian ini yakni semua ujaran yang diucapkan para pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam buku *The New Sulsel*. Ujaran yang dimaksud yakni ucapan langsung pejabat yang menjadi sumber data penelitian berada dalam tanda kutip (“”).